

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Abdulajid, Syawal dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaruan Pidana)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Aminanto, Kif. *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Jember Katamedia, 2017.
- Anderson, James, Joel Hellman, Geraint Paul Jones, Bill Moore, Helga W Muller, Sanjay Pradhan, Randi Susan Ryterman, dan M. Helen Sutch. *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. Washington DC: World Bank, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill. Co, 1997.
- Bahari, Adib dan Khotibul Umam, *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009. hal. 25
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Danil, H. Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana UI, 2004.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana UI. 2004.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kusnadi, Moh dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marbun, S. F. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Prins, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Aditya Bakti, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 2006.
- Qisa'I, Ahmad. *Orang Kampung Melawan Korupsi*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah, 2011.
- Remy, Sjahdeni. Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1995.
- Sudarto. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.

- Sumaryanto, A. Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Werry, P.L. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990.
- Yuntho, Emerson., Ellian Deta Arta Sari, Jeremiah Limbong, Ridwan Bakar, Firdaus Ilyas. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.

JURNAL & HASIL PENELITIAN

- Affandhi, Frans., Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi. "Business Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil", *USU Law Journal*, Vol. 4, Number 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, Number 2, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Bayley, J. Edward. "A Doctrine of Good Faith in New Zealand Contractual Relationships, Thesis in University of Catenbury. Thesis. University of Catenburi, 2009.
- Cahaya, Suhandi. "Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 4, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 2012.
- Fathudin. "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara)".

- Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, Number 1, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015.
- Harryono, Sumadji. "Analisis Biaya Untuk Pengambilan Keputusan Bisnis Balance Economics", *Bussiness, Management and Accounting Journal*, Vol. 08, Number 14, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Surabaya, 2011.
- Hasbullah. "Perintah Atasan atau Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, Number 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, 2017.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 01, Number 01, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
- Kpundeh, Sahr John, "Limitting Administrative Corruption in Sierra Leone", *Jurnal Modern African*, Vol. 32, Cambridge: Cambridge University, 2008.
- Lamandasa, Raimond Flora. "Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan". Tesis, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Lestari, Sartika Nanda. "*Business Judgement Rule* Sebagai *Immunity Doctrine* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 08 Number 02, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015.
- Lumopa, Farly, Suherman dan Imam Haryanto, "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia" *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, Number 2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi*

- Indonesia, Vol. 13, Number 02, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2016.
- Reniaty, Muhammad Faisal Akbar, dan Nur Ahmad Ricky Rudianto. "The Effect of Covid-19 on The Economy Of Bangka Belitung and The Performance Of MSME And Its Impact On Competitive Strategies In The New Normal Era", *Annals of Management and Organization Research (AMOR)*, Vol. 1, Number 1, Bangka Belitung: Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, 2019.
- Riana, Rati., Muhammad Junaidi. "Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, Number 4, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2018.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Number 3, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
- Sugeha, Fitrianty Rezeki. "Eksistensi Tentang Hapusnya Kewenangan Penuntut Umum Berdasarkan KUHP". *Lex Crimen* Vol. 7, No. 9. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018.
- Taniaa, Finny. "Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 11, No. 1, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2016.
- Thomsen, Frej Klem., "Concept, Principle, and Norm-Equality before the Law Reconsidered", *Legal Theory Journal*, Vol. 24, Number 02, Cambridge: Cambridge University, 2018.
- Wallerstein, Immanuel., "Citizens All? Citizens Some! The Making of the Citizen", *Comparative Studies in Society and History Journal*, Vol. 45, Number 04, New Haven: Yale University, 2003.
- Wantu, Fence. M., "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, Number 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007.

Yuntho, Emerson. “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”. Hasil Penelitian, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4654

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5872

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5899

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6236

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6485

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 918

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30K/Kr/1969

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121K/Pid.Sus/2020

KAMUS

Black, Hanry Campbell. 1968. *Black, Black's Law Dictionary 4th Ed. St. Paul.*
Minnesota. West Publishing Co, diunduh dari <
[https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Blacks-Law-
Dictionery.pdf](https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Blacks-Law-Dictionery.pdf)>

LAMAN DARING

Channelnewsasia, "Malaysia's Recovery Movement Control Order Extended To
Dec 31, Tourist Still Not Allowed In: PM Muhyiddin",
<[https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-recovery-
movement-control-order-extended-dec-31-mco-13047724](https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-recovery-movement-control-order-extended-dec-31-mco-13047724)>, diakses 19
Januari 2021.

CNN Indonesia, "Virus Corona Masuk Indonesia, Netizen Serukan Jangan Panik"
<<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200303141434-192->

480096/virus-corona-masuk-indonesia-netizen-serukan-jangan-panik>, diakses 27 Juli 2020

Detik News, “David Kurniawan Diancam Bui 20 Tahun”, <<https://news.detik.com/berita/d-1021046/david-kurniawan-diancam-bui-20-tahun>>, diakses 31 Juli 2020

Edward UP Nainggolan, “Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”, <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>>, diakses 17 Desember 2020.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran”, <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>>, diakses 30 Juli 2020

Humas Sekretariat Kabinet, “Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp383,0` triliun”, <<https://setkab.go.id/realisasi-anggaran-pemulihan-ekonomi-nasional-capai-rp38301-triliun/>>, diakses 17 Desember 2020.

Indonesia Corruption Watch, “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019”, <<https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>>, diakses 30 Juli 2020

Infografi Ministry of Finance Singapore, Version as of 16 August 2020, <https://www.sgpc.gov.sg/sgpcmedia/media_releases/mof/press_release/P-202008172/attachment/Ministerial%20Statement%20Infographic.pdf>, diakses 19 Januari 2021.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Kemenkeu Tanggap COVID-19: Informasi Terkini (Update per 28 Juli 2020)”, <<https://kemenkeu.go.id/covid19>>, diakses 31 Juli 2020

Kementrian Keuangan, “Ini 5 Strategi Pembiayaan APBN 2020 di Masa Pandemi COVID-19”, <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-5-strategi-pembiayaan-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19/>>, diakses 17 Desember 2020.

Konferensi Pers APN KITA oleh Kementerian Keuangan pada 16 Juni 2020, <
<https://www.youtube.com/watch?v=eMaaygHD7xM>>, diakses 20
Januari 2021.

Mahardika Satria Hadi, “Wakil Gubernur Pertanyakan Sisa Dana Bantuan Gempa
Aceh”, <<https://nasional.tempo.co/read/296090/wakil-gubernurpertanyakan-sisa-dana-bantuan-gempa-aceh/full&view=ok>>,
diakses 31 Juli 2020

Ministry of Manpower, “Tightening of Work Pass Requirements”,
<https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0827-tightening-of-work-pass-requirements>, diakses 19 Januari 2021.

Rebecca Ratcliffe, “Fear As Cambodia Grants PM Vast Powers Under COVID-19
Pretext”, < <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/fears-as-cambodia-grants-hun-sen-vast-power-under-covid-19-pretext>>, diakses
19 Januari 2021

Sigit Eka Pribadi, “Ini Kronologinya Sejak Awal Pemerintah Indonesia Remehkan
COVID-19, Semoga Jadi Pengalaman”,
<<https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5e85e839d541df5c6137b462/ini-kronologinya-sejak-awalpemerintah-indonesia-remehkan-COVID-19-semoga-jadi-pengalaman>>, diakses 27
Juli 2020

Tempo, “Suap Dana Pasca-Gempa Lombok, Anggota DPRD Mataram Ditangkap”,
<<https://nasional.tempo.co/read/1126551/suap-dana-pasca-gempa-lombok-anggota-dprd-mataram-ditangkap/full&view=ok>>, diakses 31
Juli 2020

The Indonesia Regional Science Association (IRSA), “Hasil Survei Ekonom terkait
Kebijakan Saat Krisis COVID-19”, <http://irsa.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Survei_Covid-19.pdf>, diakses 30 Juli 2020.

Tribun, “KPK Kecam Keras Proyek Air Minum Korban Tsunami Palu Jadi Bancakan Korupsi Pejabat PUPR”, <<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/31/kpk-kecam-keras-proyek-air-minum-korban-tsunami-palu-jadi-bancakan-korupsi-pejabat-pupr?page=2>>, diakses 31 Juli 2020

World Health Organization, “Q&A on Coronaviruses (COVID-19)”, <<https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>>, diakses 31 Juli 2020

